



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

2025



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 13 Mei 2024

Sekretaris Daerah,



Dr. Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19641115 199303 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Sekretariat Daerah 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah..... 66

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 70

 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... 83

 2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 124

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 125

 3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah..... 125

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 129

 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025 129

BAB V. PENUTUP 130

 5.1 Kaidah Pelaksanaan 130

 5.2 Penutup 130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ..	68
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	84
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	128

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel T-C33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
- e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan



dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA–OPD, karena RENJA-OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas



dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Asisten yang menaungi 6 (enam) biro yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	17,151,449,547	15,709,466,607	1,441,982,940	91.59
2	Biro Hukum	1,716,624,181	1,706,224,351	10,399,830	99.39
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1,521,546,596	1,500,954,717	20,591,879	98.65
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2,412,305,282	2,354,568,207	57,737,075	97.61
5	Biro Organisasi	2,055,347,908	2,038,112,422	17,235,486	99.16
6	Biro Umum	100,114,102,527	99,364,866,935	749,235,592	99.31

Dari enam biro tersebut jika diakumulasi maka besaran pagu anggaran Sekretariat Daerah adalah 124,971,376,041.00 dengan realisasi sebesar 122,674,193,239.00 dan menyisakan anggaran 2,297,182,802.00 sehingga persentase capaian kinerja anggaran sebesar 98,16 %. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 berjumlah 8 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2) :



Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nama OPD : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)
		1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		1				Urusan Pendukung									
		1	01			Bidang Urusan Pemerintahan									
		1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,50	0,00	70,00	70,00	100,00	72,60	142,60	1,89



		1	0 1	0 1	01		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	0,00	N/A	N/A	#VALUE!	100,00	#VALUE!	#VALUE!
		1	0 1	0 1	02		Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70,00	0,00	52,00	52,00	100,00	60,00	112,00	1,60
		1	0 1	0 1	03		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,99	0,00	97,00	97,00	100,00	98,23	195,23	1,97
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	0,00	22,40	22,40	100,00	23,00	45,40	1,97
		1	0 1	0 2			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,50	0,00	15,80	15,80	100,00	17,00	32,80	1,87
		1	0 1	0 2	01		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	0,00	9,20	9,20	100,00	9,50	18,70	1,87
		1	0 1	0 2	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,50	0,00	5,80	5,80	100,00	6,00	11,80	1,82
		1	0 1	0 2	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3	3	100	2	8,00	400,00



						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15	1	1	100	1	17,00	1700,00
		1	0 1	0 3	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10	1	1	100	1	12,00	1200,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	1	1	100,00	2	4,00	200,00
		1	0 1	0 3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	1	1	100,00	4	6,00	150,00
		1	0 1	0 3	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	100	100,00	100,00



		1	0 1	0 3	02		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100					#DIV/0!	100	100,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	1	0	0		1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100		1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	2	3	3	100		3	8,00	266,67



							Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD								
		1	0 1	0 3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	4	4,00	4,00
		1	0 1	0 3	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00



		1	0 1	0 3	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	89	89,00	89,00
		1	0 1	0 3	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	1	54	54	100	74	129,00	174,32
		1	0 1	0 3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	1	1	100	1	2,00	200,00
		1	0 1	0 3	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	#DIV/0!	4	4,00	100,00



		1	0 1	0 3	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	5	35	5	5	100	5	45,00	900,00
		1	0 1	0 3	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	87	87,00	87,00
		1	0 1	0 3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	0	0	0	#DIV/0!	3	3,00	100,00
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1614	2	2	100	1	1617,00	161700,00
		1	0 1	0 3	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6,00	300,00
		1	0 1	0 3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40	40	40	100	1	81,00	8100,00
		1	0 1	0 3	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	98	2	2	100	76	176,00	231,58



		1	0 1	0 3		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	7	7,00	7,00
		1	0 1	0 3	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	3	5	166,67	1	6,00	600,00
		1	0 1	0 3	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	2	#DIV/0!	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5	5	5	100,00	1	11,00	1100,00



		1	0 1	0 3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	3	3	100,00	2	7,00	350,00
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	1	1,00	1,00
		1	0 1	0 3	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	28	28,00	28,00
		1	0 1	0 3	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	10	5	5	100,00	1	16,00	1600,00
		1	0 1	0 3	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00



		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	0	0	0	#DIV/0!	6	6,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	0	0	0	#DIV/0!	9	9,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	2	2	100	5	9,00	180,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	2	2	100	6	10,00	166,67
		1	0 1	0 3	01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100				#DIV/0!	15	15,00	15,00
		1	0 1	0 3	02	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan	5	58	2	2	100,00	5	65,00	1300,00
		1	0 1	0 3	03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	2	1	1	100,00	2	5,00	250,00
		1	0 1	0 3	01	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	56	1	1	100,00	2	59,00	2950,00
		1	0 1	0 3	02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah	7	9	6	5	83,33	7	21,00	300,00



		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	7	2	2	100,00	2	11,00	550,00
		1	0 1	0 3		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	0	1	0	0	2	2,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	2	3	3	100	3	8,00	266,67
		1	0 1	0 3	02	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	3	2	4	2	50,000	3	7,00	233,33
		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	2	2	2	100,00	1	5,00	500,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	02	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	459	659,00	659,00
		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	100	100	100	100	100	453	653,00	653,00
		1	0 1	0 3		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300	5	913	913	100	450	1368,00	456,00
		1	0 1	0 3	01	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3	3	3	3	100	3	9,00	300,00



		1	0 1	0 3	02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar	3	7	3	3	100	3	13,00	433,33
		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	6	1	1	100	1	8,00	800,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	0	1	1	100	1	2,00	200,00
		1	0 1	0 3	02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100	100	100	100	100	3	203,00	203,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	1	1	0	0	1	2,00	200,00



		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00

Nama OPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Target Renja Perangkat Daerah tahun



									) Tahun 2023- 2026	an s/d denga n tahun 2022(n-3)	2023 (n-2)	tahun 2023 (n-2)		2024 (n-1)	berjalan (tahun 2024)	2023 (n- 2)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(1 0/4)	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	0 1					SEKRETARIAT DAERAH										
4	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	69,50	60,10	66,45	68,25	102,71	69	197,35	283,96	
							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100,00	100	300	300,00	
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	4,15	45	95,00	97,00	102,11	4,00	146	3518,07	
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	100,00	98,73	100,00	81,93	81,93	100,00	280,66	280,66	
4	0 1	0 1	1	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25,50		22,00	21,80	99,09	22,50	44,30	173,73	
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19,50		19,00	18,25	96,05	19,50	37,75	193,59	
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9,50		8,10	7,75	95,68	8,50	16,25	171,05	
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	5,00		21,00	20,75	98,81	21,50	42,25	845,00	



4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	6	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	300,00



4	0 1	0 1	1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	99,00	98,73	98,50	81,93	83,18	99,00	279,66	2,82
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	24,27	25	24,68	98,72	25,00	73,95	0,74
4	0 1	0 1	1	0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	3	3,00



4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	100	3	9	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100,00	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00



4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	0	0	0	0	36	36	0,60
4	0 1	0 1	1	0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	0 1	0 1	1	0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0	1	1	0,25
4	0 1	0 1	1	0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5	0	0	0	0	1	1	0,20



							Peraturan Perundang-Undangan									
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00	
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	1,00	
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10	10	10	100	10	30	30,00	
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6	3,00	
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	0	18	18	100	5	23	7,67	
4	01	01	1	06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	50	50	50	100	75	175	2,19	
4	01	01	1	06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00	



4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00	
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	9	9	100	15	24	4,00	
4	01	01	1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	3	3
4	0 1	0 1	1	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	11	11	100	11	33	3,00
4	0 1	0 1	1	0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	13	13	100	13	39	3,00
4	0 1	0 1	1	0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 9	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10	0	10	10	100	10	20	2,00



							Dipelihara/ Direhabilitasi										
4	0 1	0 1	1	0 9	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	18	3,00		
0 4	0 1	0 5				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	100	100	118,5	118,5	100	318,5	3,19		
0 4	0 1	0 5	1	0 1		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100	100	100	123	123	100	323	3,23		
0 4	0 1	0 5	1	0 1	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	47	35	58	165,71	40	145	3,63		
0 4	0 1	0 5	1	0 1	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	504	500	491	98,20	500	1495	2,88		
0 4	0 1	0 5	1	0 1	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	709	570	673	118,07	600	1982	3,30		
0 4	0 1	0 5	1	0 1	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	243	135	239	177,04	141	623	4,42		
0 4	0 1	0 5	1	0 2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	100	114	114	100	314	3,14		
0 4	0 1	0 5	1	0 2	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2	2	1	3	300	2	7	3,50		



0	0	0	1	0	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	6	6	6	100	2	14	7,00

Nama OPD : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0	1				BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4	0	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65	58,87	59,85	68,50	100	62	0	0,00



							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75	52	52	78	100	65	0	0,00
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	80,32	94	98,47	100	95	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	20,61	22	20	100	24,08	0	0,00
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	14,38	22	20	100	20,50	0	0,00
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80	8,79	9	9,75	100	10,80	0	0,00
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,50	4,09	7	18,75	100	8,85	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	6	6	100	2	1	50,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	2	30	30	100	2	1	50,00



							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja									
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	0	0	0	0	95	0	0,00	
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0,00	
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00	



4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	0	0	0	0	3	1	33,33
4	0 1	0 1	1	0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	98,04	98,04	
4	0 1	0 1	1	0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	0	0	0	0	47	47		100,00
4	0 1	0 1	1	0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	4	4	100	4	3	75,00
4	0 1	0 1	1	0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0
4	0 1	0 1	1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	63,33	63,33
4	0 1	0 1	1	0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4	1	1	100	1	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	18	1	1	100	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	100	1	1	100	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	120	120	100	25	19	76,00
4	0 1	0 1	1	0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	100,00
4	0 1	0 1	1	0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 7	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 7	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0	1	0	0,00



4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	61	30	30,43
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	25	13	13	100	12	6	50,00
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	0	10	10	100	2	1	50,00
4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	8	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 6				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	96,88	100	100	100	100	19,17	21,30
4	0 1	0 6	1	0 1		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	93,75	100	100	100	100	20,00	22,22
4	0 1	0 6	1	0 1	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	12	4	4	100	5	1	20,00
4	0 1	0 6	1	0 1	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	3	4	4	100	5	1	20,00
4	0 1	0 6	1	0 2		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	0	100	100	100	100	12,50	12,50
4	0 1	0 6	1	0 2	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	0	0	0	0	4	0	0,00
4	0 1	0 6	1	0 2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 6	1	0 2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12	0	4	4	100	4	1	25,00



							Energi dan Air										
4	01	06	1	03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	100	100	100	100	100	25,00	25,00		
4	01	06	1	03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	14	12	12	12	100	4	1	25,00		
4	01	06	1	03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	14	4	4	4	100	4	1	25,00		
4	01	06	1	03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	01	06	1	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12	5	1	1	100	4	1	25,00		



4	0 1	0 6	1	0 3	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi danEvaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 8				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	33,71	100	100	100	100	20	20,00
4	0 1	0 8	1	0 1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	62,16	100	100	100	100	20	20,00
4	0 1	0 8	1	0 1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	0	4	4	100	0	0	0,00
4	0 1	0 8	1	0 1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	6	4	4	100	5	1	20,00
4	0 1	0 8	1	0 1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13	17	4	4	100	5	1	20,00
4	0 1	0 8	1	0 2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	5	100	100	100	100	20	20,00
4	0 1	0 8	1	0 2	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	2	4	4	100	5	1	20,00
4	0	0	1	0	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	0	1	1	100	0	0	0,00

Nama OPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0	1				SEKRETARIAT DAERAH									
4	0	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60	0	50	74,25	148,50	55	129,25	2,15



							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70	30	50	81	162	60	171	2,44
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,37	93,32	94,4	98,56	104,41	94,50	286,38	2,97
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	26,50	126,19	22	48,50	2,16
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	24,00	114,29	22	46,00	2,04
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50	0	9	11,25	125,00	9,50	20,75	2,18
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	6	12,50	208,33	6,50	19,00	0,93
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	97,00	93,32	100	98,68	98,68	96,00	288	2,97
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00



4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	0	0	0	100	100	1,00
4	0 1	0 1	1	0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	0 1	0 1	1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	96,67	100	100,00	100,00	100	296,67	2,97



4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30	30	30	100	30	90	3,00
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	30	3,00
4	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	40	40	40	100	40	120	3,00
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	36	40	40	100	40	116	2,90
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100,00	100,00	100	300	3,00
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	1,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	0	7	7	100	15	22	1,47
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00



4	0 1	0 1	1	0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	100	4	4	1
4	0 1	0 1	1	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	0	0	0	0	2	2	0,67
4	0 1	0 1	1	0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	7	7	7	100	7	21,00	1,91
0 4	0 1	0 7				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,95	69,51	70,90	65,00	91,68	73,03	207,54	2,73
0 4	0 1	0 7	1	0 1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	100	100	100	100	100	300	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 1	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	2	2	100,00	2	6	3,00



04	01	07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	0	100	100	100,00	100	200	2,00
04	01	07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	4	4	4	100,00	4	12,00	3,00
04	01	07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100,00	100,00	100	300,00	3,00
04	01	07	1	03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	30	30	100	30	90	3,00



04	01	07	1	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00
04	01	07	1	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00

Nama OPD : Biro Organisasi

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	89	80	83	80	96%	86	246	276%



								Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
								Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	75	37	55	94	171%	60	191	255%
								Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97	97	97	99	102%	97	293	302%
4	0 1	0 1	1	0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	26	25	25	98%	28	79	282%
								Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	24	19	25	23	90%	22	63	264%
								Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	15	13	14	13	89%	15	40	275%
								Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	18	6	16	21	128%	14	40	223%
4	0 1	0 1	1	0 1	000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3	3	100%	2	7	350%
4	0 1	0 1	1	0 1	000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%



4	0 1	0 1	1	0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	0	0	0	-	2	2	100%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	0	0	0	-	29	29	55%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0	10	10	100%	12	22	183%
4	0 1	0 1	1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%



4	0 1	0 1	1	0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	300	300	300	100%	300	900	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	80	80	80	100%	80	240	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	60	60	60	100%	60	180	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	70	100%	70	210	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
4	0 1	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%



4	0	0	1	0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	15	15	15	100%	15	45	300%
4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0	0	1	0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0	0	1	0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	13	13	100%	13	39	300%
4	0	0	1	0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0	0	-	5	5	100%
4	0	0				Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mnimal B+	33	33	33	33	100%	33	99	297%
							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada	100	50	83	34	41%	100	184	184%



							Komponen Penilaian SAKIP									
4	01	02	1	01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	85	65	75	75	100%	80	220	259%	
							Indeks Kematangan Organisasi	46	0	37	37	101%	37	74	162%	
4	01	02	1	01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%	
4	01	02	1	01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	6	6	100%	6	18	300%	
4	01	02	1	01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%	
4	01	02	1	02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	65	10	40	50	125%	50	110	169%	
							Nilai SAKIP Pemprov.	74	68	70	69	98%	70	207	279%	
4	01	02	1	02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	8	8	8	8	100%	8	24	300%	



4	0	0	1	0	000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	7	7	7	7	100%	7	21	300%
4	0	0	1	0	000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4	0	0	1	0	000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	30	20	20	20	100%	20	60	200%
4	0	0	1	0	000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%

Nama OPD : Biro Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)



		1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(1 0/4)
		1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		1	0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	101,6	0	24	17,1	71,25%	24,6	41,7	41,04%
		1	0 1	0 1			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	63,5	0	20	19,06	95,30%	20,5	39,56	62,30%
		1	0 1	0 1	01		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	37,8	0	12	10,41	86,75%	12,3	22,71	60,08%
		1	0 1	0 1	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	25,7	0	8	5,25	65,63%	8,2	13,45	52,33%
		1	0 1	0 1	03		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	50,8	0	16	13	81,25%	16,4	29,4	57,87%
		1	0 1	0 2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	6	6	7	100,00%	7	20	71,43%
		1	0 1	0 2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
		1	0 1	0 2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%



		1	0 1	0 2	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	8	6	2	2	100,00%	2	10	125,00%
		1	0 1	0 3	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	8	66,66%	7	21	70,00%
		1	0 1	0 3	03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	400	0	95	100	100,00%	100	200	50,00%
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	400	98	90	100	100,00%	100	298	74,50%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13440	300	3360	3360	93,00%	3360	7020	52,23%



						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109	0	100	100	100,00%	3	103	94,50%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Biro Umum	9950	0	12	12	100,00%	2400	2412	24,24%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	4	12	12	12	100,00%	1	25	625,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	8	1	1	1	100,00%	2	4	50,00%
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	0	100	100	100,00%	5	105	525,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	64	6	16	16	100,00%	16	38	59,38%
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	98,96	98,96%	100	198,96	49,74%



						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	120	1	30	30	100,00%	30	61	50,83%
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	4	4	100,00%	4	8	50,00%
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	0	0	0,00%	4	4	25,00%
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	24	0	3	3	100,00%	6	9	37,50%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	288	0	12	12	100,00%	72	84	29,17%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	8	0	12	12	100,00%	2	14	175,00%
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	40	28	1	1	100,00%	1	30	75,00%



						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4	0	0	0	0,00%	1	1	25,00%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,34	99,34%	100	199,34	49,84%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31	21	575	575	100,00%	7	603	1945,16 %
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40	70	1	1	100,00%	10	81	202,50%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	0	75	72	96,00%	7	79	282,14%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	0				10	10	25,00%



						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	19	100	100	100,00%	50	169	84,50%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,78	99,78%	100	199,78	49,95%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	0	25	25	100,00%	4	29	181,25%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	0	20	11	55,00%	4	15	93,75%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	36	15	15	100,00%	2	53	662,50%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	15	15	15	100,00%	2	32	400,00%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	0	16	16	100,00%	12	28	58,33%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	320	750	596	79,47%	12	928	1933,33 %
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	20	1	1	100,00%	1	22	550,00%



						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	400	0	95	95	100,00%	100	195	48,75%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18	5	5	5	100,00%	3	13	72,22%
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	0				5	5	19,23%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	4	2	2	100,00%	10	16	33,33%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	280	10	30	30	100,00%	70	110	39,29%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	100	96,22%	100	200	50,00%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	4865	100	100	100,00%	12	4977	10368,75 %
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	4	4	4	100,00%	12	20	41,67%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%



						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	98,49	98,49%	100	198,49	49,62%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	17	20	20	100,00%	20	57	71,25%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480	164	150	150	100,00%	120	434	90,42%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	680	35	70	70	100,00%	170	275	40,44%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	4	12	12	100,00%	12	28	58,33%
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%



						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	0	5	5	100,00%	6	11	45,83%
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%
						Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20	0	40	40	100,00%	5	45	225,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15	0	40	40	100,00%	5	45	300,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	40	0	800	774	96,75%	10	784	1960,00 %
						Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	400	0	100	97,31	97,31%	100	197,31	49,33%
						Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	845	0	2000	1448	72,40%	200	1648	195,03%
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3900	1500	1200	1070	89,17%	900	3470	88,97%



						Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6200	0	2500	2500	100,00%	1400	3900	62,90%
						Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan (Persen)	400	0	100	99,02	99,02%	100	0	0,00%
						Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4600	0	1800	1677	93,17%	1000	2677	58,20%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	43	100	100	100,00%	12	155	322,92%
						Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	4070	0	1800	1800	100,00%	900	2700	66,34%

Mamuju, 13 Mei 2023

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Muhammad Idris, M.Si
Nip : 196411151993031001



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitas dan Pembinaan di bidang Keagamaan			100	100	100	100	100	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Hukum

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Reformasi Hukum			60	70	80	90	-	-	80	90	



Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Kualitas Kebijakan			60	70	80	90	-	-	80	90	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			70,90	73,03	73,03	75,95	89,91	-	73,03	75,95	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kelembagaan			2	B	B+	B+	-B	B	B+	B+	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Layanan			N/A	100	100	100	100	-	100	100	



2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur pendukung yang memiliki peran penting dibawah kepemimpinan sekretaris daerah yang dilimpahkan pada biro-biro. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu kedepan.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Penilaian LPPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga poin LPPD menjadi rapor yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan LPPD oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun LPPD Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan LPPD oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Sehingga untuk meningkatkan poin LPPD, upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik hasil dimaksimalkan.

Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan, pembinaan dan monitoring; maupun pemahaman aparatur di masing-masing instansi yang menyusun LPPD sangat penting untuk diperhatikan . Sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD.

2. Belum Optimalnya Fasilitas Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang *urgent* untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

3. Belum Optimalnya fasilitas penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat dihindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementrian Dalam Negeri serta masing-masing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

4. Belum optimalnya fasilitas kerjasama daerah

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat

kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindak lanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan.

5. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi terkait bidang keagamaan ini banyak yang menjadi isu penting sebab menjadi salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan Hibah Rumah Ibadah yang selalu dilakukan setiap tahun menjadi salah satu hal yang banyak dimanfaatkan oleh umat beragama yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan rumah ibadah ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah ibadah yang akan dan telah menerima bantuan.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok masih memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQ pun perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQ saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

6. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Hal ini tercermin dalam peran pemerintah Provinsi terkait dana BOS yang belum diatur secara jelas sehingga dalam panyaluran dana BOS bisa terjadi melibatkan komunikasi langsung antara KPPN dengan pihak sekolah di kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibuatkannya aturan hukum yang secara jelas menetapkan SOP dan peran masing-masing instansi/perangkat daerah dalam penyaluran dan pengawasan dana BOS ini.

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut perlu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah,

perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD

Tujuan utama pembentukan/pendirian BUMD dan BLUD merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah di sektor bisnis. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini BUMD dan BLUD belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD di Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan karena:

Khusus untuk BUMD Perumda Sebuk Energi Malaqbi terkendala dengan belum diserahkannya dana PI (Participating Interest) oleh kontraktor pengelola migas pada blok Sebuk;

Khusus untuk BUMD Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi, pengelolaan perseroda tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Direksi pengelola Perusda;

Khusus untuk BLUD penerimaan pendapatan yang diterima pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD. Hal ini dikarenakan jumlah pasien yang diproyeksikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Belum optimalnya Pengendalian dan perumusan kebijakan perekonomian daerah terkait inflasi daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia

tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas (kelompok kerja nasional) TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Diharapkan, TPID ke depan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha dan instansi terkait kebijakan akses keuangan daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. (1)

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat terintegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realisasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan

pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapat mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum optimalnya kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 24 orang dari kebutuhan 44 orang pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 54.55%). Selain itu juga belum memiliki personil perencanaan, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan

personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap Perangkat Daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra. Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi kordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang profesional untuk mengelola bagian-bagian seperti admin, pemeliharaan perangkat. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Mulai dari backup keamanan sampai pada fasilitas administrasi.

Ketiga, adalah pengelolaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada kordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidani

keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

- e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru

pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/ prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah. (1)

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan

Pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi biro umum yakni kurangnya pengendalian dan keterlambatan penyediaan logistik pada rumah tangga pimpinan dan kurangnya pengendalian, pengawasan serta

pemeliharaan kendaraan dan bangunan. Hal tersebut menjadi faktor lemahnya Pelayanan Kerumahtanggaan dan pelayanan umum. Padahal Salah Satu Sentral Pelayanan Pimpinan Berada pada Biro Umum Oleh Karenanya Hal Tersebut Harus Mendapatkan Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Pemahaman terkait pelaksanaan tugas pramusaji dan supir pimpinan / operasional juga masih perlu di tingkatkan mengingat hal tersebut merupakan kegiatan yang melekat dan merupakan pelayanan langsung.

2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat.

Sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* di daerah. Bagian bagian lain yang sama pentingnya adalah ménata sistem perencanaan dan penganggaran, sistem penatausahaan, sistem akuntansi dan pelaporan. Tuntutan pembaharuan dan akuntabilitas sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mendasarkan konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas public (*Public accountability*).

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih

dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

4. Belum optimalnya pelayanan pimpinan.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

5. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan
Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegiatan pimpinan ditentukan pengaturan acara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggara kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pimpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertifikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD merupakan susunan awal dari program kerja dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang telah direview dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pada tahapan RKPD.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 (T-C.31) berikut ini :

Tabel 2.4 (T-C31)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								25,456,742,000.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				24,406,742,000.00				25,456,742,000.00	
	-				24,406,742,000.00				25,456,742,000.00	
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		-	-	3,704,261,000.00		-	-	4,044,261,000.00	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		-	-	1,303,950,000.00		-	-	1,443,950,000.00	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan									
		Kab Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>	1 Dokumen	631,700,000.00	Kab Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>	1 Dokumen	701,700,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum									
		Kab Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>	2 Dokumen	382,130,000.00	Kab Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>	2 Dokumen	452,130,000.00	
	Fasilitasi Penataan Wilayah									
		Kab Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i>	4 Dokumen	290,120,000.00	Kab Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i>	4 Dokumen	290,120,000.00	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		-	-	1,409,171,000.00		-	-	1,409,171,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	733,421,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	733,421,000.00	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	200,320,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	200,320,000.00	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan									
		Kab Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	475,430,000.00	Kab Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	475,430,000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		-	-	991,140,000.00		-	-	1,191,140,000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	596,140,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	596,140,000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	6 Dokumen	250,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	6 Dokumen	350,000,000.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	8 Laporan	145,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	8 Laporan	245,000,000.00	
2.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	-	18,375,680,000.00		-	-	18,855,680,000.00	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		-	-	15,472,400,000.00		-	-	16,072,400,000.00	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1000 Unit	11,532,900,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1000 Unit	11,532,900,000.00	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>	5 Lembaga	3,939,500,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>	5 Lembaga	4,539,500,000.00	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		-	-	1,342,860,000.00		-	-	1,222,860,000.00	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	1 Dokumen	592,860,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	1 Dokumen	412,860,000.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	1 Dokumen	350,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	1 Dokumen	390,000,000.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	1 Dokumen	400,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	1 Dokumen	420,000,000.00	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		-	-	1,560,420,000.00		-	-	1,560,420,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	2 Dokumen	610,420,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	2 Dokumen	610,420,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja										



		Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i>	2 Dokumen	650,000,000.00	Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i>	2 Dokumen	650,000,000.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i>	2 Dokumen	300,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i>	2 Dokumen	300,000,000.00	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	2,326,801,000.00		-	-	2,556,801,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	438,700,000.00		-	-	518,700,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	256,430,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	296,430,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	56,310,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	96,310,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	61,230,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	61,230,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,160,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,160,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28,300,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28,300,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,120,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,120,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	7,150,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	7,150,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	13,330,000.00		-	-	23,330,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8,120,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	18,120,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,210,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,210,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	466,969,000.00		-	-	466,969,000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	124,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	124,000,000.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	79,640,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	79,640,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	64,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	64,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	199,329,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	199,329,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	990,839,000.00		-	-	1,030,839,000.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	19,999,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	59,999,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	613,240,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	613,240,000.00	
	Penyediaan Bahan/Material									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	122,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	122,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	66,700,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	66,700,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	168,900,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	168,900,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	89,540,000.00		-	-	89,540,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	89,540,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	89,540,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	327,423,000.00		-	-	427,423,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	56,732,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	56,732,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	69,490,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	169,490,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	201,201,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	201,201,000.00	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM				2,889,836,584.00				3,804,836,584.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2,889,836,584.00				3,804,836,584.00	
	-				2,889,836,584.00				3,804,836,584.00	



1.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		-	-	1,660,000,000.00		-	-	1,920,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		-	-	970,000,000.00		-	-	1,130,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	50 Dokumen	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	50 Dokumen	250,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	530 Dokumen	190,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	530 Dokumen	250,000,000.00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	625 Dokumen	170,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	625 Dokumen	270,000,000.00	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	153 Dokumen	360,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	153 Dokumen	360,000,000.00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		-	-	690,000,000.00		-	-	790,000,000.00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus	600,000,000.00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus	190,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus	190,000,000.00	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	1,229,836,584.00		-	-	1,884,836,584.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	163,296,584.00		-	-	253,296,584.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38,296,584.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	68,296,584.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
		Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	90,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	90,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	55,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	35,000,000.00		-	-	50,000,000.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	10,000,000.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	131,540,000.00		-	-	161,540,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	80,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	71,540,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	71,540,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	10,000,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	10,000,000.00		-	-	40,000,000.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	35,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	590,000,000.00		-	-	730,000,000.00	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	400,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	500,000,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000.00	
Penyediaan Bahan/Material										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	10,000,000.00		-	-	10,000,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		-	-	100,000,000.00		-	-	250,000,000.00	



	Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	250,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	190,000,000.00		-	-	390,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	100,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	200,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	150,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20,000,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000.00	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				7,509,874,447.00				8,419,874,447.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7,509,874,447.00				8,419,874,447.00	
	-				7,509,874,447.00				8,419,874,447.00	



1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>	100 Persen	2,790,000,000.00		<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>	100 Persen	3,120,000,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		<i>Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	90 Persen	1,235,000,000.00		<i>Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	90 Persen	1,485,000,000.00	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	12 Dokumen	1,035,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	12 Dokumen	1,235,000,000.00	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	2 Dokumen	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	2 Dokumen	250,000,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		-	-	420,000,000.00		-	-	460,000,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	6 Dokumen	160,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	6 Dokumen	200,000,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	2 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	2 Dokumen	100,000,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	12 Dokumen	160,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	12 Dokumen	160,000,000.00	



	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		-	-	1,135,000,000.00		-	-	1,175,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	400,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	400,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	6 Dokumen	485,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	6 Dokumen	525,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD									
		Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	5 Dokumen	250,000,000.00	Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	5 Dokumen	250,000,000.00	
2.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		-	-	604,000,000.00		-	-	644,000,000.00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		-	-	384,000,000.00		-	-	424,000,000.00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	169,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	209,000,000.00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	10 Laporan	215,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	10 Laporan	215,000,000.00	



	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		-	-	220,000,000.00		-	-	220,000,000.00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	6 Laporan	220,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	6 Laporan	220,000,000.00	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	4,115,874,447.00		-	-	4,655,874,447.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	160,908,620.00		-	-	230,908,620.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	47,672,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	87,672,660.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	18,872,660.00	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	18,872,660.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	18,872,660.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	48,872,660.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	109,534,331.00		-	-	119,534,331.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	12,290,886.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	2 Dokumen	6,290,886.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	2 Dokumen	6,290,886.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	10,290,886.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	6,290,886.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	6,290,886.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	71,789,015.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	71,789,015.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	6,290,886.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	356,021,520.00		-	-	656,021,520.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	135,127,690.00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	30 Unit	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	30 Unit	35,127,690.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	35,127,690.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	30 Dokumen	110,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	30 Dokumen	110,127,690.00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	35,127,690.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	35,127,690.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	35,127,690.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	35,127,690.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	235,127,690.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	95,110,668.00		-	-	95,110,668.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18,777,667.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18,777,667.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	28,777,667.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	28,777,667.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18,777,667.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18,777,667.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	28,777,667.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	28,777,667.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1,675,079,794.00		-	-	1,695,079,794.00	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	290,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	290,000,000.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	162,513,299.00	
Penyediaan Bahan/Material									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	162,513,299.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	350,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	450,000,000.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	82,513,299.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	6 Dokumen	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	6 Dokumen	162,513,299.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	162,513,299.00		-	-	162,513,299.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	162,513,299.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	162,513,299.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1,322,039,592.00		-	-	1,392,039,592.00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	606,941,464.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	606,941,464.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	550,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	550,000,000.00	
	Pengadaan Mebel									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	153,774,532.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	153,774,532.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	3,774,532.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	53,774,532.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Mamuju, Simboro dan	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau</i>	1 Unit	3,774,532.00	Kab Mamuju, Simboro dan	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau</i>	1 Unit	3,774,532.00	



		Kepulauan, Simboro	Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kepulauan, Simboro	Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,774,532.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23,774,532.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	234,666,623.00		-	-	304,666,623.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	100,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	170,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83,166,932.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83,166,932.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	21,499,691.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	21,499,691.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000.00	
NO	RANCANGAN AWAL RKPd					RANCANGAN AWAL RKPd				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					3,000,000,000.00				3,580,000,000.00	



	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3,000,000,000.00				3,580,000,000.00	
	-				3,000,000,000.00				3,580,000,000.00	
1.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		-	-	1,972,000,000.00		-	-	2,332,000,000.00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-	-	600,000,000.00		-	-	700,000,000.00	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	200,000,000.00	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	250,000,000.00	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	250,000,000.00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		-	-	760,000,000.00		-	-	820,000,000.00	
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	180,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	240,000,000.00	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	400,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	400,000,000.00	
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	180,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	180,000,000.00	



	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		-	-	612,000,000.00		-	-	812,000,000.00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	400,000,000.00	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	200,000,000.00	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	212,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	212,000,000.00	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	1,028,000,000.00		-	-	1,248,000,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	148,000,000.00		-	-	198,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	73,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	55,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	65,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	20,000,000.00		-	-	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	190,000,000.00		-	-	190,000,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	140,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	140,000,000.00	



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	50,000,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	465,000,000.00		-	-	565,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	250,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	350,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	100,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	100,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15,000,000.00	
Penyediaan Bahan/Material									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	100,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	100,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	10,000,000.00		-	-	10,000,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	75,000,000.00		-	-	75,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	120,000,000.00		-	-	190,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	130,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60,000,000.00	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI				2,558,500,000.00				2,898,500,000.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2,558,500,000.00				2,898,500,000.00	
	-				2,558,500,000.00				2,898,500,000.00	
1.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		-	-	1,330,000,000.00		-	-	1,530,000,000.00	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		-	-	575,000,000.00		-	-	605,000,000.00	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220,000,000.00	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota										



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	135,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	135,000,000.00	
	Penataan Analisis Jabatan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	220,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	250,000,000.00	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		-	-	755,000,000.00		-	-	925,000,000.00	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	185,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	285,000,000.00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	140,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	140,000,000.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	110,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	110,000,000.00	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	35 Dokumen	120,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	35 Dokumen	120,000,000.00	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	270,000,000.00	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	1,228,500,000.00		-	-	1,368,500,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	425,000,000.00		-	-	425,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	140,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	140,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	95,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	95,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	93,000,000.00		-	-	93,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	75,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	75,000,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	18,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	18,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	493,500,000.00		-	-	633,500,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	70,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	45,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	45,000,000.00	
	Penyediaan Bahan/Material									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Paket	80,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Paket	80,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	254,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	354,000,000.00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	6,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	6,000,000.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	58,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	58,500,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	30,000,000.00		-	-	30,000,000.00	
	Pengadaan Mebel									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	30,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	70,000,000.00		-	-	70,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	70,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	70,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	117,000,000.00		-	-	117,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									



		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	94,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	94,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23,000,000.00	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	3	10	4	8	9	10	4	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM								118,509,256,552.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				109,909,256,552.00				118,509,256,552.00	
	-				109,909,256,552.00				118,509,256,552.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	109,909,256,552.00		-	-	118,509,256,552.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	16 Poin 13 Poin 21 Poin 26 Poin	863,779,714.00		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	16 Poin 13 Poin 21 Poin 26 Poin	863,779,714.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	314,295,663.00	Kab Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	314,295,663.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	383,786,050.00	Kab Mamuju, Simboro dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	383,786,050.00	



		Kepulauan, Rangas				Kepulauan, Rangas				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	27,171,579.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	27,171,579.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	26,855,921.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	26,855,921.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	21,273,616.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	21,273,616.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	48,371,598.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	48,371,598.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	42,025,287.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	42,025,287.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	32,571,237,120.00		-	-	34,471,237,120.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	75 Dokumen	217,593,803.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	75 Dokumen	217,593,803.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3360 Orang/ Bulan	30,430,500,649.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3360 Orang/ Bulan	32,430,500,649.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	427,555,468.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	327,555,468.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2450 Dokumen	1,281,639,560.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2450 Dokumen	1,281,639,560.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	52,547,423.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	52,547,423.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	125,066,872.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	125,066,872.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	36,333,345.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	36,333,345.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	1,505,514,394.00		-	-	1,605,514,394.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	607,740,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	707,740,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	79,076,418.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	79,076,418.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75 Dokumen	161,065,325.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75 Dokumen	161,065,325.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27 Dokumen	196,921,046.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27 Dokumen	196,921,046.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	163,758,782.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	163,758,782.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	296,952,823.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	296,952,823.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	5,142,214,518.00		-	-	5,042,214,518.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	557,335,224.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	557,335,224.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	110,359,831.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	110,359,831.00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	1,037,404,730.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	1,037,404,730.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Laporan	311,881,696.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Laporan	311,881,696.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	2,267,016,665.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	2,267,016,665.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	30 Dokumen	508,216,372.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	30 Dokumen	508,216,372.00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	350,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	250,000,000.00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	-	112,713,464.00		-	-	112,713,464.00	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	1 Dokumen	112,713,464.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	1 Dokumen	112,713,464.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	9,340,179,333.00		-	-	9,540,179,333.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	74,173,004.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	174,173,004.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	724,086,906.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	724,086,906.00	



Fasilitas Kunjungan Tamu										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,363,334,466.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,363,334,466.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	330,152,867.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	430,152,867.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,167,878,697.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,167,878,697.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	481,097,666.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	481,097,666.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1,149,455,727.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1,149,455,727.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	6,426,540,879.00		-	-	8,326,540,879.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,376,605,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,276,605,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,707,544,649.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3,707,544,649.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	342,391,230.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	342,391,230.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	10,282,701,000.00		-	-	12,282,701,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	2,000,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	2,000,000,000.00	
Pengadaan Mebel										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	12 Paket	500,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	12 Paket	500,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	30 Unit	7,200,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	50 Unit	9,200,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	582,701,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	582,701,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	8,543,089,895.00		-	-	8,543,089,895.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	20 Unit	1,169,037,951.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	20 Unit	1,169,037,951.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	2,549,270,400.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	2,549,270,400.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	1,084,848,551.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	1,084,848,551.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	3,739,932,993.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	3,739,932,993.00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	2,063,282,808.00		-	-	2,063,282,808.00	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	1,250,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	1,250,000,000.00	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60,000,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	753,282,808.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	753,282,808.00	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		-	-	18,879,077,008.00		-	-	19,479,077,008.00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	8,260,747,924.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	8,860,747,924.00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	5,718,329,084.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	5,718,329,084.00	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										



		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	4,900,000,000.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	4,900,000,000.00	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		-	-	9,555,328,504.00		-	-	10,355,328,504.00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	700 Laporan	9,008,754,031.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	700 Laporan	9,808,754,031.00	
	Penyiapan Materi Pimpinan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	174,254,391.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	174,254,391.00	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	372,320,082.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	372,320,082.00	
	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen	4,623,597,915.00		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen	5,823,597,915.00	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	750 Laporan	1,039,218,211.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	750 Laporan	1,339,218,211.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	2,683,259,853.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	3,283,259,853.00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara									
		Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	901,119,851.00	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1,201,119,851.00	
					150,274,209,583.00				162,669,209,583.00	



2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki catatan usulan untuk Sekretariat Daerah pada umumnya dan Biro-biro pada khususnya baik itu dari Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan ataupun para stakeholder. Dengan demikian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 tidak memuat Program ataupun Kegiatan yang berasal dari usulan-usulan tersebut.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;



- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Umum

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Program, kegiatan dan subkegiatan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 yaitu Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran, Mewujudkan database SIPD terpadu, Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan, Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Subkegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan maupun subkegiatan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

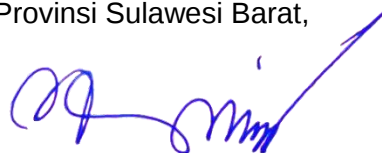
1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ini, memuat tujuan, sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP. : 19640015 199303 1 001



Tabel T-C33. Rumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						24.406.742.000,00							26.933.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						24.406.742.000,00							26.933.000.000,00	
	-	-						24.406.742.000,00							26.933.000.000,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-			-	3.704.261.000,00					-	-	4.212.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	1.303.950.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	631.700.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				2 Dokumen	382.130.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.000	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	290.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	1.409.171.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	733.421.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		760.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				2 Dokumen	200.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	475.430.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	991.140.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.182.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	596.140.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				6 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		372.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				8 Laporan	145.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN	-	-			-	18.375.680.000,00						-	20.155.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	15.472.400.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1000 Unit	11.532.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				5 Lembaga	3.939.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	1.342.860.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	592.860.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		435.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	1.560.420.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				2 Dokumen	610.420.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.326.801.000,00						-	2.566.000.000,00	

	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	438.700.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	457.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	7.150.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	466.969.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	3 Orang	64.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	4 Paket	124.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	327.423.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	374.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	5 Unit	56.732.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	9 Unit	69.490.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	-	-	-	3 Unit	201.201.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	89.540.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	5 Unit	89.540.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	990.839.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.057.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	1 Dokumen	19.999.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	2 Laporan	613.240.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	122.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	256.430.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM						2.889.836.584,00							3.116.540.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.889.836.584,00							3.116.540.000,00	
	-	-						2.889.836.584,00							3.116.540.000,00	
1.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI	-	-			-	1.660.000.000,00						-	1.745.000.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-			-	970.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	1.025.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				50 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				530 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				625 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				153 Dokumen	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			-	690.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				4 Kasus	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				4 Kasus	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.229.836.584,00						-	1.371.540.000,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	590.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	131.540.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	131.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	590.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				11 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	590.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

-	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
-	-		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada															
-	-		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	131.540.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	131.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut															
-	-		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	71.540.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	71.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi															
-	-		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	590.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Penyediaan Komponen Instalasi															
-	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-	-	-	-	163.296.584,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
-	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	38.296.584,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
-	-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen															
-	-		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
-	-		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
-	-		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
-	-		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	-	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
-	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	35.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas															

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rongas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rongas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rongas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		PRIORITAS	TARGE T		PAGU INDIKATIF (Rp)
													DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						7.509.874.447,00							7.959.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7.509.874.447,00							7.959.000.000,00	
	-	-						7.509.874.447,00							7.959.000.000,00	
1.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-			100 Persen	2.790.000.000,00					-	-	2.905.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			90 Persen	1.235.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				12 Dokumen	1.035.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	420.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				6 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				12 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	1.135.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				4 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				6 Dokumen	485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-			-	604.000.000,00						-	610.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	384.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12 Laporan	169.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				10 Laporan	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				6 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	4.115.874.447,00						-	4.444.000.000,00	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	356.021.520,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35.127.690,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	160.908.620,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	18.872.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	109.534.331,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6.290.886,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	6.290.886,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	6.290.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	6.290.886,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	6.290.886,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran				4 Laporan	71.789.015,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	6.290.886,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	95.110.668,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	18.777.667,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	28.777.667,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	18.777.667,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Pa ke t	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Pa ke t	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penyediaan Bahan/Material																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	1.322.039.592,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-		1.438.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	606.941.464,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	550.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	153.774.532,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.774.532,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.774.532,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.774.532,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.513.299,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	162.513.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	234.666.623,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	193.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Paikaknya				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	83.166.932,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	21.499.691,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.000.000.000,00							3.280.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.000.000.000,00							3.280.000.000,00	
	-	-						3.000.000.000,00							3.280.000.000,00	
1.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	1.972.000.000,00					-		2.145.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	600.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rongas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	760.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				4 Laporan	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	612.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	212.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.028.000.000,00						-	1.135.000.000,00	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	465.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		-	-	148.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	140.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	465.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
-	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI						2.558.500.000,00							2.671.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.558.500.000,00							2.671.000.000,00	
	-	-						2.558.500.000,00							2.671.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	1.330.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	575.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.000	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi				3 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	755.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				8 Dokumen	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				7 Dokumen	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				35 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.228.500.000,00					-		1.271.000.000,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	493.500.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	501.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-			-	425.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	93.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.		-	99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				48 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	493.500.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.		-	501.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				60 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	254.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	58.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			59.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.		-	31.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			31.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.		-	71.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.			71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			-	117.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		119.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	94.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM						109.909.256.552,00							85.032.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						109.909.256.552,00							85.032.000.000,00	
	-	-						109.909.256.552,00							85.032.000.000,00	
1.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	109.909.256.552,00					-		85.032.000.000,00	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.571.237.120,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	2.216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	427.555.468,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2450 Dokumen	1.281.639.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75 Dokumen	217.593.803,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.543.089.895,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	9.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				150 Unit	3.739.932.993,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.571.237.120,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	2.216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3360 Orang/ Bulan	30.430.500.649,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	-			16 Poin 13 Poin 21 Poin 26 Poin	863.779.714,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	783.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	383.786.050,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	Biro Umum		390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	27.171.579,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	26.855.921,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	21.273.616,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	48.371.598,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	42.025.287,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	314.295.663,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	Biro Umum		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	9.555.328.504,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-	-	9.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				700 Laporan	9.008.754.031,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		9.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 Dokumen	174.254.391,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	18.879.077.008,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-	-	19.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	8.260.747.924,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5.718.329.084,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		5.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	2.063.282.808,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-	-	2.355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/ Bulan	1.250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	753.282.808,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	8.543.089.895,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-	-	9.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				12 Unit	2.549.270.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	1.084.848.551,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.426.540.879,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	6.770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.376.605.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2.707.544.649,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	342.391.230,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.282.701.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	12.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	7.200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	582.701.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.340.179.333,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	9.653.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	74.173.004,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	724.086.906,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.363.334.466,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	330.152.867,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.167.878.697,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		4.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	481.097.666,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.149.455.727,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.505.514.394,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	1.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	607.740.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	79.076.418,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan. Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

	-		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75 Dokumen	161.065.325,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				27 Dokumen	196.921.046,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-		Pendataan dan Pengolahan Administrasi													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	163.758.782,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	296.952.823,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Peranokat Daerah	-	-			-	112.713.464,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi				1 Dokumen	112.713.464,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah	-	-			-	5.142.214.518,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	5.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	557.335.224,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	110.359.831,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	1.037.404.730,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	311.881.696,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	18.879.077.008,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	19.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	4.900.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	-			100 Persen	4.623.597.915,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	4.940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				750 Laporan	1.039.218.211,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	2.683.259.853,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	901.119.851,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	9.555.328.504,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	9.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	372.320.082,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.142.214.518,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	5.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.340.179.333,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif. Efisien dan	-		9.653.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.282.701.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	12.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.543.089.895,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	9.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Paiknnya				20 Unit	1.169.037.951,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	2.063.282.808,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	2.355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.142.214.518,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	5.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	2.267.016.665,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	508.216.372,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.571.237.120,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-	-	2.216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran				16 Laporan	52.547.423,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	125.066.872,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif.	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	36.333.345,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
			J U M L A H					150.274.209.583,00							128.991.540.000,00	